T E S I S

KEBIJAKAN SOSIAL TERHADAP KERAWANAN PANGAN LANSIA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

SOCIAL POLICY ON ELDERLY FOOD INSECURITY IN SOUTH SULAWESI IN 2022

HUZAIMAH

PROGRAM STUDI
MAGISTER SOSIOLOGI KONSENTRASI KEPENDUDUKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

KEBIJAKAN SOSIAL TERHADAP KERAWANAN PANGAN LANSIA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

SOCIAL POLICY ON ELDERLY FOOD INSECURITY IN SOUTH SULAWESI IN 2022

TESIS

HUZAIMAH

E032221018

PROGRAM STUDI

MAGISTER SOSIOLOGI KONSENTRASI KEPENDUDUKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

KEBIJAKAN SOSIAL TERHADAP KERAWANAN PANGAN LANSIA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

SOCIAL POLICY ON ELDERLY FOOD INSECURITY IN SOUTH SULAWESI IN 2022

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi

Sosiologi Konsentrasi Kependudukan

Disusun dan diajukan oleh

HUZAIMAH

E032221018

Kepada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

KEBIAJAKAN SOSIAL TERHADAP KERAWANAN PANGAN LANSIA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Disusun dan diajukan oleh

HUZAIMAH

E032221018

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi Konsentrasi Kependudukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **19 Januari 2024**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Hasbi Marissangan, M.Si.,Ph.D	**Dr.Rahmat Muhammad,M.Si**
Nip.19600827 199103 1 003	**Nip.197005131 199702 1 002**
Ketua Program Studi Magister Sosiologi,	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
Dr. Sakaria To Anwar, M.Si	**Prof. Dr. Phil Sukri,S.IP M.Si**
Nip.19690130 200604 1 001	**Nip. 19750818 200801 1 008**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Kebijakan Sosial Terhadap Kerawanan Pangan Lansia di Sulawesi Selatan Tahun 2022" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D. dan Dr. Rahmat Muahammad, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal (Journal of Humanity and Social Justice, Volume 5, Issue 2, 2023 , Halaman 97-109) Sebagai Artikel Dengan Judul "***Kompleksitas Kerawanan Pangan Lansia: Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia***".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Januari 2024

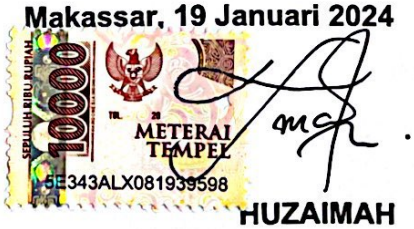

HUZAIMAH

NIM E03222101

UCAPAN TERIMA KASIH

***Alhamdulillah**,* Segala puji Bagi Allah yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam berpikir dan beraktivitas sehingga tesis ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan dari Prof. Hasbi Marissangan M.Si., dan Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. , serta masukan yang sangat berharga dari tim penguji yaitu Bapak Dr. Iqbal Latief, M.Si. , Bapak Dr. Andi Lukman Irwan S.IP. M.Si. dan Bapak Dr. Sawedi Muhammad, M.A. . Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Suntono, M.Si. Kepala Pusdiklat BPS RI dan Bu Dr. Eni Lestariningsih, M.A. selaku Kepala Biro SDM BPS RI yang telah mengizinkan dan mendukung terselesainya tesis ini melalui izin Tugas Belajar dan memilih saya sebagai penerima beasiswa APBN BPS Tahun 2022. Kepada Dekan FISIP, Bapak Prof. Dr.Phil. Sukri M.Si yang telah memberikan izin kepada kami untuk segala kemudahan perizinannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen Sosiologi di FISIP Unhas atas bantuan dan ilmunya. Kepada Teman-teman Tugas Belajar "*S3 Wanna Be*" (Ka Ika Dewi, Ka Titin, Ka Ulul, Ka Rani, Ka Ayya, Ka Juned, Ka Edy), saya mengucapkan terima kasih dukungan dan semangatnya selama penyelasaian tesis ini, selamat bekerja kembali dengan penuh dedikasi di BPS Seluruh Indonesia. Spesial, Untuk suamiku tercinta, Khaerunnas, laki-laki hebat yang bisa membersamaiku hingga hari ini, terima kasih atas dukungan secara moriil dan materiil, dan juga anak-anakku tersayang yang selalu sabar, kalian hebat sayang. Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta, keluarga, dan teman-teman, saya mengucapkan limpahan terima kasih atas doa dan memotivasi selama saya menempuh Pendidikan.

Penulis,

HUZAIMAH

ABSTRAK

HUZAIMAH. *Kebijakan Sosial terhadap Kerawanan Pangan Lansia di Sulawesi Selatan Tahun 2022* (dibimbing oleh Hasbi Marissangan dan Rahmat Muhammad).

Permasalahan lansia khususnya terkait kesejahteraannya semakin penting untuk diperhatikan karena persentase lansia semakin meningkat baik di dunia maupun di Indonesia. Kerawanan pangan lansia adalah salah satu permasalahan yang sulit diatasi karena penyebabnya berbeda dari populasi pada umumnya. Berbagai bentuk kebijakan dilakukan pemerintah untuk menyukseskan *active aging* agar lansia tetap aktif dan produktif di usia tua. Akan tetapi, pada kenyataannya belum memberikan perubahan yang permanen bagi kesejahteraan lansia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan analisis fenomenologis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini belum ada program khusus pemerintah khususnya untuk lansia di Sulawesi Selatan untuk mencegah kerawanan pangan lansia. Semua program menyangkut lansia dalam mencegah kerawanan pangan dilakukan secara tidak langsung. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan indeks disabilitas para lansia yaitu ADL dasar dan IADL dalam memilih lansia yang layak untuk menerima bantuan modal usaha. Dengan demikian, lansia yang sudah tidak produktif diberikan kebijakan berbeda seperti pemberian nutrisi secara langsung, sehingga implementasi kebijakannya lebih tepat sasaran dan lebih efektif dari segi anggaran.

Kata kunci: kerawanan pangan, lansia, kebijakan sosial

ABSTRACT

HUZAIMAH. *Social Policy on Elderly Food Insecurity in South Sulawesi in 2022* (supervised by Hasbi Marissangan and Rahmat Muhammad)

The concerns of the elderly, particularly related to their welfare, are increasingly significant to pay attention to because the percentage of elderly people is increasing both in the world and in Indonesia. Elderly food insecurity is one of the problems that is challenging to overwhelm because the causes are different from the general population. Various forms of policies carried out by the government to facilitate active aging so that the elderly remain active and productive in old age have not provided permanent changes for the welfare of the elderly. This research was a qualitative study using phenomenology as an analysis tool. The results of this study reveal that mindful preparation is needed in the planning of each program, so it is necessary to evaluate the readiness of the elderly to receive programs carried out by the government. It is hoped that the government will pay attention to the disability index, i.e. the basic ADL and IADL in selecting eligible elderly people to receive venture capital assistance. Therefore, the elderly who are no longer able to be productive are given different policies, so the implementation is more targeted and more effective in terms of budget.

Keywords: food insecurity, elderly, social policy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN PENGAJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GRAFIK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Tujuan Penelitian 12
1.4. Manfaat Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1. Lanjut Usia 14
2.1.1. Konsep dan Definisi Lanjut Usia 14
2.1.2. Teori Lanjut Usia 18
2.2. Kerawanan Pangan 25
2.3. Kebijakan Sosial 41
2.4. Penelitian Terdahulu 44
2.5. Kerangka Konseptual 51
BAB III METODE PENELITIAN 54
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 54
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 55
3.3. Unit Analisis Penelitian 55
3.4. Teknik Pengumpulan Data 56
3.5. Teknik Analisis Data 57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 63

4.1. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kerawanan Pangan Lansia di Sulawesi Selatan 63
4.2. Implementasi Kebijakan Dalam Rangka Mencegah Kerawanan Pangan Lansia di Sulawesi Selatan 76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 89
5.1 Kesimpulan 89
5.2 Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN-LAMPIRAN 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase tingkat kerawanan pangan lansia di Sulawesi Selatan Tahun 2021 (data diolah) 4
Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian 52
Gambar 3 Alur analisis data 60
Gambar 4 Skala Prioritas Pemerintah dalam Penanganan Kerawanan Pangan Lansia 73
Gambar 5 Ilustrasi realisasi implementasi kebijakan pemerintah terhadap mencegah kerawanan pangan lansia 87
Gambar 6 Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Provinsi Seulawesi Selatan 106
Gambar 7 Wawancara bersama Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Selatan 107
Gambar 8 Wawancara bersama Dinas Sosial Prov. Sulawesi Selatan 107
Gambar 9 Wawancara Bersama Responden An. Sakka 68th 108
Gambar 10 Wawancara bersama responden bernama halimah (65 Tahun) 108
Gambar 11 Wawancara Bersama Dinas Sosial Kab. Sinjai , Ibu Yuni 109

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Penelitian Terdahulu Terkait Kesejahteraan Lansia..... 46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Urutan Provinsi dengan Persentase Penduduk Tua di Indonesia 1
Grafik 2 Tren rasio ketergantungan lansia di Indonesia 2017 - 2021.....2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proporsi penduduk dunia yang yang berumur 60 tahun keatas diproyeksi mengalami kenaikan 12 persen hingga 22 persen antara tahun 2015 dan tahun 2050 (WHO, 2015). Indonesia sendiri tengah menuju fase *aging population* dimana hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa proporsi lansia pada tahun 2020 di Indonesia sudah mencapai 9,93 persen. Suatu negara dikatakan mengalami penuaan penduduk jika persentase penduduk lansia mencapai 10 persen lebih (Adioetomo, Cicih, Asmanedi, & Toersilaningsih, 2014)

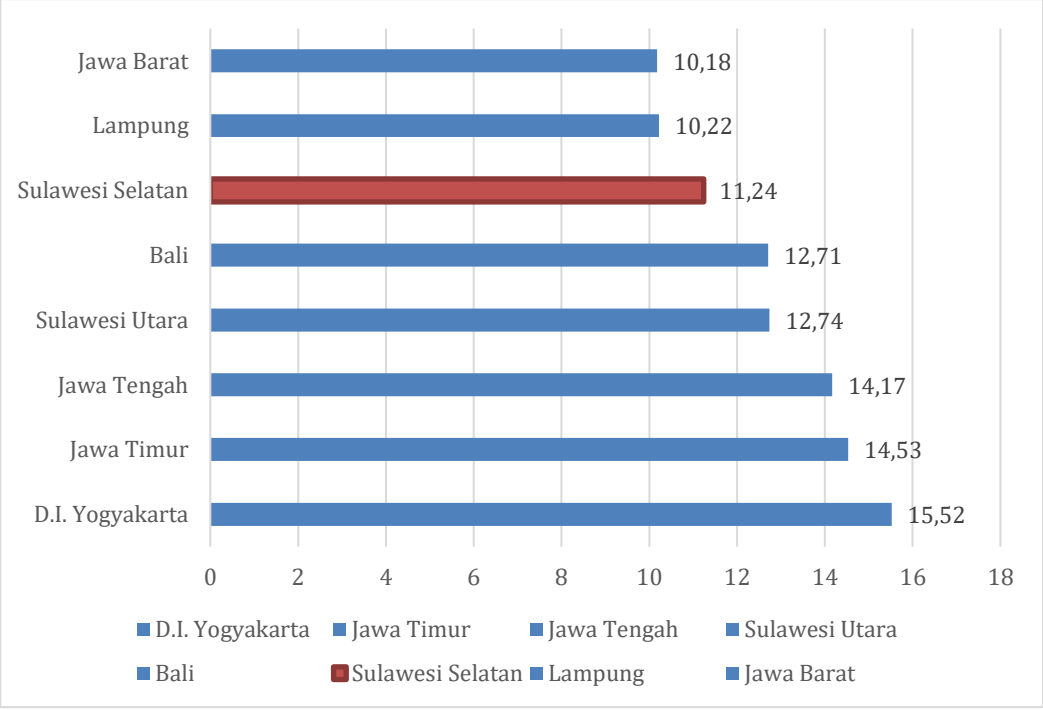

Grafik 1Urutan Provinsi dengan Persentase Penduduk Tua di Indonesia

Sedangkan berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, terdapat delapan provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua karena persentase

penduduk lansia yang sudah diatas 10 persen. Delapan provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (15,52 persen), Jawa Timur (14,53 persen), Jawa Tengah (14,17 persen), Sulawesi Utara (12,74 persen), Bali (12,71 persen), Sulawesi Selatan (11,24 persen), Lampung (10,22 persen), dan Jawa Barat (10,18 persen).

Peningkatan jumlah penduduk struktur tua, diiringi dengan penurunan angka kelahiran (TFR) berdampak pada meningkatnya rasio ketergantungan dimana lansia secara angka dianggap beban bagi generasi produktif. Dalam struktur kependudukan, lansia merupakan kelompok usia "beban", yang berarti memiliki ketergantungan terhadap kelompok usia produktif. Jumlahnya yang semakin banyak, secara tidak langsung, memiliki dampak sosial dan ekonomi baik bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial (BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021, 2022)

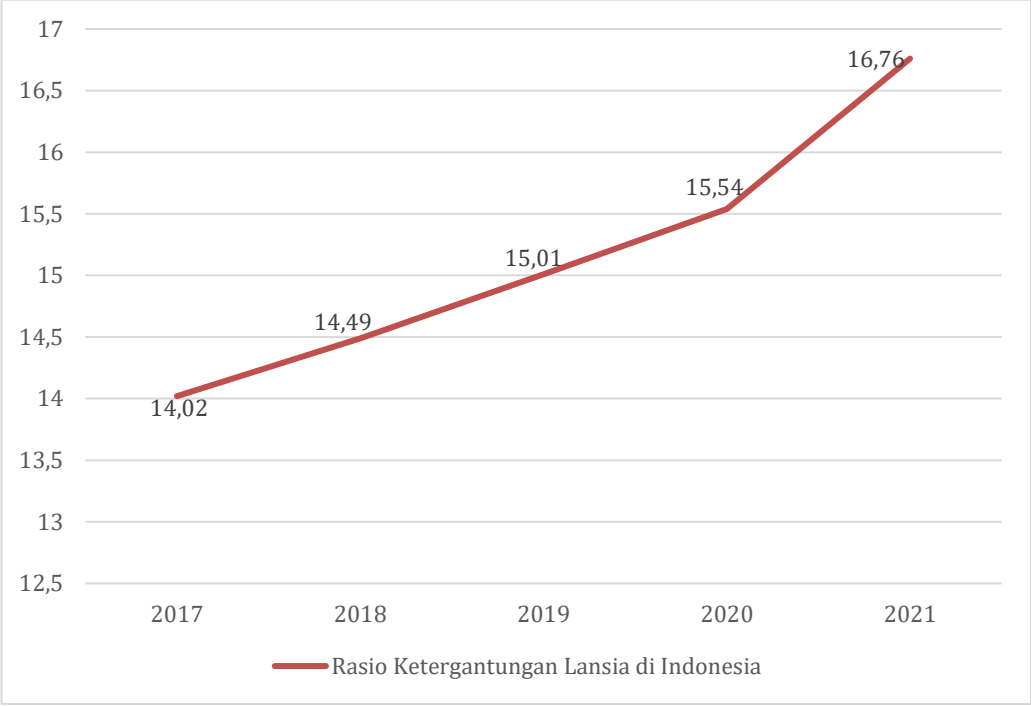

Grafik 2Tren rasio ketergantungan lansia di Indonesia 2017 - 2021

Selama lima tahun terakhir, rasio ketergantungan lansia terus meningkat dari 14,02 pada tahun 2017 menjadi 16,76 di tahun 2021 (Jayani, 2021). Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung setidaknya 17 orang penduduk lanjut usia. Peningkatan penduduk lanjut usia berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan, termasuk perawatan, yang pada akhirnya menjadi beban ekonomi penduduk usia produktif dalam rangka pembiayaan penduduk lanjut usia. Untuk itu perlu adanya peningkatan sinergi dalam pelaksanaan program bagi lansia yang dapat mengurangi beban ketergantungan pada lansia pada kelompok usia produktif. Hal ini bertujuan agar lansia tetap sehat, mandiri dan aktif selama mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama lansia bekerja.

Populasi lansia merupakan masalah sosiologis dan medis yang dapat dengan mudah diabaikan bila dibandingkan dengan masalah lain yang saat ini lebih mendesak di dalam negeri. Bukan hanya beban ekonomi, keluarga yang merawat lansia juga memiliki beban psikologis tersendiri, maraknya kekerasan terhadap lansia yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri adalah dampak dari rasa lelah yang berkepanjangan yang dirasakan anggota keluarga dan ketidakmandirian lansia secara fiungsional maupun finansial. Hal ini sesuai dengan penelitian bahwa caregiver yang setiap hari berhadapan dengan lansia akan merasa tidak kuat dan cenderung merasakan stres dan kelelahan fisik yang menyebabkan ada beberapa perilaku agresivitas yang mereka lakukan seperti agresivitas verbal maupun nonverbal (Putra, 2021). Kekerasan yang diterima lansia kebanyakan adalah kekerasan psikologis dan kekerasan pengabaian (Aryanti, Dwidiyanti, & Widyastuti, 2019). Merawat lansia yang tidak mandiri butuh kesabaran dan memungkinkan akan memakan waktu yang relatif lama. Masa tua akan berjalan semakin panjang beriringan dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup (AHH), diharapkan dalam menjalani masa tua, setiap individu tetap

bahagia dan sejahtera sebelum mencapai *fixed limit of life* (kematian). Leonard Leonard Hayflick (1965) dengan teorinya tentang Hayflick limit mengungkapkan bahwa usia hidup seseorang ada batasnya yang dikenal dengan konsep *fixed limit of life* dan peran DNA (Bartlett, 2014). DNA dan kromosom akan senantiasa membelah (*telomere*). Pembelahan biasanya disebabkan oleh penyakit atau hal-hal genetik yang mempercepat kematian. Jika penyakit dan penyebab kematian lainnya dapat dihindari, maka seseorang bisa hidup hingga usia 110 tahun dan itu adalah bukan waktu yang singkat. Menjalani kehidupan di usia senja yang panjang dan sejahtera adalah impian setiap manusia. Namun, fakta dan data mengatakan bahwa lansia di khususnya di Sulawesi Selatan masih banyak yang berjuang pada kubangan kemiskinan dan kelaparan.

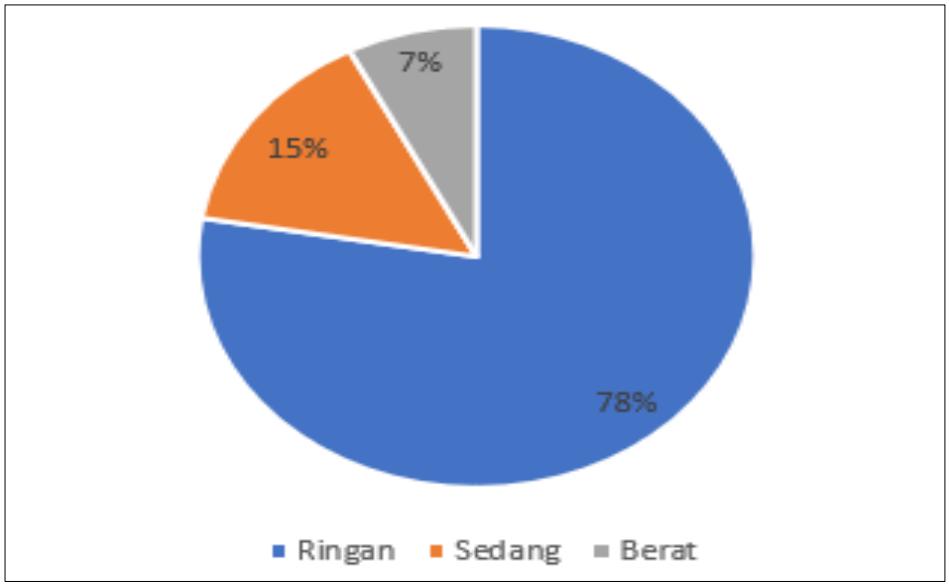

Gambar 1 Persentase tingkat kerawanan pangan lansia di Sulawesi Selatan Tahun 2021 (data diolah)

Dari seluruh lansia di Sulawesi Selatan yang masuk kedalam kategori rawan pangan, sebanyak 77 persen lansia masuk dalam kategori rawan pangan ringan, 15 persen lansia masuk dalam kategori rawan pangan sedang, dan 7 persen lansia masuk dalam kategori rawan pangan berat. Kerawanan pangan adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius, penanda kekurangan materi yang meluas, dan

masalah kebijakan publik yang tidak efektif. Kebijakan yang berfokus pada pada populasi yang lebih tua dianggap penting karena kelompok ini sangatlah rentan rawanpangan dan jumlahnya banyak.

Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional secara fakta belum dapat lolos dari 10 besar provinsi dengan angka stunting tertinggi (Mediasulsel, 2019). Lalu jika kita memperhatikan lebih dalam lagi terkait lansia, dimana mereka memiliki posisi lebih yang rumit dari balita karena perhatian keluarga dan pemerintah lebih banyak tercurah kepada bayi dan balita. Hal ini disinyalir terjadi keadaan dimana ketidakcukupan nutrisi yang lebih buruk terhadap kesehatan pada lansia. Namun program-program pemerintah saat ini kebanyakan menyasar pada orang-orang miskin dan disabilitas. Jika ada program untuk lansia maka hanya difokuskan pada lansia miskin saja. Padahal banyak lansia yang membutuhkan perhatian tanpa memandang status ekonomi lansia tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa ditemukan dua lansia di kota Mojokerto terjebak dalam rumah dimana salah satunya ditemukan dalam keadaan meninggal dan satunya lagi dalam keadaan stroke di kasur dalam kondisi lemas karena tidak ada yang memberinya makan (Radarmojokerto.com, 2023). Selain itu juga, kejadian memilukan juga terjadi di salah satu perumahan *elite* di area Jakarta Barat dimana satu keluarga yang ditemukan meninggal dunia di kompleks Citra Garden 1 Extension, Kalideres yang terdiri dari tiga lanjut usia (lansia). Tewasnya tiga lansia ini disebabkan karena kelaparan selama 3 Minggu karena kesulitan untuk memasak (tribunnews.com, 2022). Hal yang lebih memilukan karena lansia tersebut meninggal tidak bersamaan namun tidak dapat menolong satu sama lain dan dari hasil pemeriksaan tidak terdapat makanan dilambung jenazah semakin memperkuat bukti bahwa lansia tersebut meninggal akibat

kelaparan. Berita serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan, dimana diberitakan bahwa ditemukan seorang lansia asal Kabupaten Bone meninggal dunia karena kelaparan dan sebelum ditemukan meninggal, lansia tersebut sempat menemui anaknya di Kota Makassar (makassar.tribunnews, 2022). Maraknya kejadian lansia kelaparan hingga meninggal dunia ini semakin membuktikan bahwa kelaparan pada lansia tidak memandang tingkat ekonomi. Hal ini tentunya mempersulit tercapainya SDGs dimana amanat konstitusi ”pangan adalah hak asasi manusia sehingga kelaparan tidak dapat ditoleransi”, disinyalir masih jauh dari harapan (kompas.id, 2023).

Dari tahun ke tahun populasi tua semakin meningkat sedangkan angka kelahiran semakin turun ditandai dengan turunnya TFR dalam 20 tahun terakhir (BPS, Berita Resmi Statistik : Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, 2023). Semakin naiknya populasi lansia akan diikuti dengan berbagai permasalahan sosial didalamnya. Dengan semakin panjanganya angka harapan hidup tentunya diharapkan lansia bisa menjalani masa tua dengan sehat dan sejahtera. Laporan Badan Pusat Statistik terkait prevalensi kerawanan pangan sedang ke berat di Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 3,78 persen.

Seperti yang kita ketahui bahwa pendorong kerawanan pangan pada lansia berbeda dengan penyebab kerawanan pangan pada populasi pada umumnya, sehingga persentase lansia yang rawan pangan lebih tinggi daripada yang dilaporkan saat ini (Lee, Shen, & Nishita, 2022). Oleh karena itu, penyebab kerawanan pangan perlu dikaji lebih dalam lagi dengan memisahkan bayi, balita, dan lansia dalam analisisnya. Banyak masayarakat menyadari pentingnya nutrisi optimal pada usia lanjut seperti pada bayi dan balita namun ada banyak tantangan yang menghalangi pencapaian tujuan ini (PAN PONDATION, 2021).

Sering kali, lansia dianggap orang dewasa namun mereka sering menghadapi gangguan fungsional, disabilitas, isolasi, kurangnya transportasi dan

keuangan kerentanan karena penurunan pendapatan atau peningkatan biaya pengobatan. Mereka juga sering tinggal dengan orang lain, karena mereka mungkin tidak memiliki rumah. Sehingga mereka yang tinggal sendiri memiliki risiko lebih besar untuk menjadi rawan pangan (Park, 2019). Hal ini berlaku bahkan untuk masalah seperti "terlalu sulit untuk pergi ke toko" dan "tidak dapat memasak atau makan karena masalah kesehatan" (Nord, 2013), namun hal ini banyak diabaikan karena lansia dianggap terlalu dewasa untuk diasuh. Sejumlah orang tua berusaha memastikan anak cucu mereka cukup makan. Bahkan beberapa program pemerintah menargetkan lansia untuk tangguh dan ikut serta dalam pencegahan stunting dengan melibatkan lansia dalam pengasuhan bayi dan balita karena mereka dianggap lebih berpengalaman dalam pengasuhan (BKKBN, 2021). Hal ini bukan hal yang salah namun, pemerintah juga tentu harus memberikan perhatian lebih kepada lansia karena mereka juga butuh bantuan dari segala aspek. Solusi dari permasalahan kesejahteraan lansia pada dasarnya berasal dari keluarga terdekat lansia itu sendiri. Dengan adanya dukungan keluarga yang baik maka akan meningkatkan kualitas hidup lansia sehingga mereka dapat menikmati masa tua dengan baik (Hasbi, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia, 2023). Namun, banyak lansia enggan untuk meminta bantuan atau tidak memiliki anggota keluarga yang dapat membantu mereka, baik karena jarak maupun sumber daya yang terbatas (Purdam, Esmail, & Garrat, 2019). Untuk lansia yang rawan pangan, keterbatasan keuangan ini seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mematuhi anjuran perawatan kesehatan (Mireya & Rafael, 2017).

Kerawanan pangan memiliki dimensi tumpang tindih yang berbeda dan kurangnya dukungan perawatan sosial, isolasi sosial dan keterjangkauan diidentifikasi sebagai isu utama untuk orang tua baik dalam analisis survei kuantitatif dan wawancara kualitatif (Purdam, Esmail, & Garrat, 2019).

Kesenjangan perawatan yang ditunjukkan oleh tidak adanya dukungan perawatan sosial, termasuk membantu berbelanja dan menyiapkan makanan, sangat jelas terlihat pada orang lanjut usia yang tinggal sendiri. Secara umum tidak hanya faktor personal tetapi juga kondisi sosial dapat menghambat lansia mencapai status ketahanan pangan penuh. perlu adanya berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan di kalangan lansia baik melalui level komunitas maupun level individu (Park, 2019).

Peningkatan yang signifikan pada status gizi lansia yang berada pada tingkatan dibawah optimal merupakan dampak dari penurunan nafsu makan dan kurangnya asupan makanan yang masuk kedalam tubuh lansia. Ketika individu telah memasuki masa usia lanjut, akan mengalami berbagai perubahan seperti penurunan kondisi fisik, psikis, sosial, produktivitas, ketidakmampuan bekerja atau dapat bekerja namun tidak lagi maksimal untuk pemenuhan hidup. Hal ini akan menimbulkan dampak berupa alokasi biaya besar dan peningkatan pelayanan demi peningkatan kesejahteraan para usia lanjut.

Tidak hanya perubahan dan dampak dari perubahan yang hanya dialami oleh individu usia lanjut, namun individu usia lanjut juga memiliki harapan-harapan untuk tetap aktif, sehat dan mampu berkarya. Kesejahteraan yang diharapkan tentu bukan hanya dari segi ekonomi, akan tetapi kesejahteraan dari segi kesehatan juga harus menjadi salah satu fokus yang diperhatikan untuk kehidupan lanjut usia. Kemajuan dalam pengobatan dan standar hidup yang lebih baik membuat semakin banyak orang di seluruh dunia berharap untuk hidup dengan baik sampai usia tua. Namun, orang lanjut usia dicirikan oleh keragaman yang besar, dan umur panjang tidak selalu disertai dengan kesehatan yang lebih baik.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah terjunnya para lansia di sektor pertanian. Berdasarkan hasil survei Sakernas yang yang setiap tahun dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa pekerjaan

utama penduduk di Sulawesi Selatan Sebagian masih terus didominasi di Sektor pertanian. Data juga menunjukkan bahwa lansia di Sulawesi Selatan ternyata masih aktif bekerja dan mengurus tumahtangga, hanya sebesar 0,48 persen lansia yang menganggur atau tidak melakukan aktifitas (BPS, Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Selatan 2020, 2021). Bahkan dari seluruh lansia yang masih aktif bekerja ada sebanyak 63,46 persen lansia di Sulawesi Selatan memiliki pekerjaan utama disektor pertanian (BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021, 2022). Penuaan populasi pertanian telah mendapat perhatian yang besar dari media dan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pengamat berkomentar tentang meningkatnya usia rata-rata petani di negara berpenghasilan rendah dan menengah dan adanya potensi implikasi negatif terhadap produksi pertanian dan kerawanan pangan (Heide-Ottosen, 2014).

Mensejahterakan petani lansia juga dapat menjadi langkah awal mensejahterakan lansia pada umumnya khususnya di daerah potensial penghasil padi dan beras seperti di Sulawesi Selatan, sehingga dalam penelitian ini juka akan mengkaji adanya kemungkinan kerawanan pangan pada lansia di lumbung padi nasional yang dalam hal ini adalah lansia yang terlibat dalam sektor pertanian.

Kebijakan publik didefenisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemasyarakatan. Saat ini semakin banyak masalah yang dianggap sebagai masalah sosial oleh para pengambil keputusan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Permasalahan baru dalam agenda kebijakan publik berbeda-beda di setiap negara, sebuah narasi yang menonjol pun muncul dengan menyatakan bahwa kebijakan publik ‘sering’ gagal dalam setiap implementasinya, dan beberapa bahkan mengklaim bahwa “kegagalan terjadi di mana-mana” (Mueller, 2020). Jika benar, klaim ini layak mendapat perhatian mendesak dari para pengambil kebijakan sosial agar mencari cara yang lebih baik untuk menemukan solusi terhadap permasalahan sosial.

Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk penuaan penduduk di tahun 2030.

Susah saatnya semua elemen masyatakat sadar akan pentingnya mempelajari kebijakan sosial, dalam hal ini, dengan pemahaman yang baik terhadap kebijakan sosial maka akan sangat membantu memahami respon masyarakat dan dapat dengan mudah mengidentifikasi kebutuhan dan masalah sosial (Titmuss & Richard, 1974). Melakukan analisis kebijakan sosial dapat memenuhi kebutuhan akan informasi terkait penilaian yang bijaksana dan tidak memihak dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini terutama berlaku ketika keputusan harus diambil dengan cepat karena tenggat waktu yang semakin dekat atau ketika isu-isu tersebut bersifat kontroversial atau mungkin bersifat politik (Sagepub, 2021). Pada dasarnya, analisis kebijakan melibatkan pandangan ke depan untuk mengantisipasi konsekuensi dari suatu keputusan dan memikirkannya secara serius dan kritis.

Penelitian tentang kebutuhan lansia harus diutamakan, karena mengatasi masalah lansia akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan dengan demikian mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah dan masyarakat untuk merawat mereka. Penelitian mengenai kerawanan pangan pada lansia juga memiliki signifikansi yang penting dalam memastikan kesejahteraan dan kesehatan mereka. Kondisi fisik dan perubahan sistem pencernaan yang umum pada lansia menuntut pemahaman mendalam tentang kebutuhan nutrisi yang spesifik untuk mempertahankan kesehatan optimal. Keamanan pangan menjadi aspek krusial, terutama mengingat lansia lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit terkait makanan. Aspek sosial dan psikologis makanan juga harus dipertimbangkan untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan lansia. Melalui penelitian ini, kita dapat merancang strategi yang mendukung kemandirian lansia dalam pemilihan, persiapan, dan konsumsi makanan mereka sendiri. Selain

itu, hasil penelitian memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan program pemerintah yang mendukung kebutuhan nutrisi lansia, memastikan penuaan yang sehat dan aktif dalam masyarakat.

Kebijakan terkait kesejahteraan lansia sudah banyak dilaksanakan oleh berbagai institusi pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang mengakibatkan kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan tidak merata bahkan target SDGs yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan belum dapat dicapai. Kendala untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030 disebabkan adanya kesenjangan antara pembuatan kebijakan dan implementasinya, hal ini akibat dari manifestasi dari sistem politik dan pemerintahan (Hill, 2022). Implikasinya terhadap teori implementasi adalah kita harus memandang implementasi dari sudut pandang yang sangat berbeda – yaitu implementasi pemeriksaan lain dalam sistem pemerintahan kita. Dengan perbaikan sistem dan data berbasis nasional yang kuat tentang lansia dimana berisi informasi tentang kebutuhan akan layanan, penggunaan layanan, dan hal-hal yang bersifat informatif tentang lansia akan berguna untuk data penelitian guna membantu perencanaan mengenai lansia dikemudian hari.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan kerawanan pangan lansia di Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 ?
b. Bagaimana implementasi kebijakan sosial dalam penanggulangan kerawanan pangan lansia di Sulawesi Selatan pada Tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah :

a. Untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam penanggulangan kerawanan pangan lansia di Sulawesi Selatan pada Tahun 2022
b. Untuk menganalisis implementasi kebijakan sosial terhadap kerawanan pangan lansia di Sulawesi Selatan pada Tahun 2022

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang terdapat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari analisis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memberikan gambaran terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi kerawanan pangan serta implementasi kebijakannya, khususnya pada populasi lansia agar kedepannya lansia dapat menjadi prioritas pemerintah dalam setiap program meningkatan kesejahteraan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya yang menganalisis tema dan topik yang berkaiatan dengan kesejahteraan lansia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengevaluasi program-program untuk lansia yang sudah berjalan, khususnya

bagi daerah yang mempunyai presentase tingkat kerawanan pangan lansia yang tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapakan mampu memberikan masukan kepada pemerintah pusat maupun daerah mengenai intervensi yang harus dilakukan khususnya bagi penduduk lansia yang mengalami rawan pangan serta dapat menjadi bahan rujukan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan program dan layanan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kerawanan pangan, khusunya bagi populasi lansia**.**

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lanjut Usia

2.1.1. Konsep dan Definisi Lanjut Usia

Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia (Aru, 2009). Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya (Tamher & Noorkasiani, 2009). Secara umum seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap konsisi stress fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual (Efendi, 2009).

a. Batasan-batasan Lansia

Di Indonesia lanjut usia adalah usia 60 tahun keatas. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. Beberapa pendapat para ahli tentang batasan usia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada empat tahapan yaitu: Usia pertengahan (middle age) usia 45-59 tahun; Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun; Lanjut usia tua (old) usia 75-90 tahun; Usia sangat tua (very old) usia > 90 tahun

2. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015) mengelompokkan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan risiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan)

3. Klasifikasi Lansia Menurut Depkes RI (2013) klasifikasi lansia terdiri dari Pra lansia yaitu seorang yang berusia antara 45-59 tahun; Lansia ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih; Lansia risiko tinggi ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan; Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa; Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

b. Karakteristik Lansia

Menurut pusat data dan informasi, kementrian kesehatan RI (2016), karakteristik lansia dapat dilihat berdasarkan kelompok berikut ini :

1. Jenis kelamin Lansia lebih didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya, ini menunjukan bahwa harapan hidup yang paling tinggi adalah perempuan.

2. Status perkawinan Penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya sebagian besar berstatus kawin 60% dan cerai mati 37%
3. Living arrangement Angka beban tanggungan adalah angka yang menunjukan perbandingan banyaknya orang tidak produktif (umur 65 tahun) dengan orang berusia produktif (umur 15-64 tahun). Angka tersebut menjadi cermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia nonproduktif.

4. Kondisi kesehatan Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan bisa menjadi indikator kesehatan negatif. Artinya, semakin rendah angka kesakitan menunjukan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Perundangan tentang lansia yang sampai sekarang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Asas peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. Dengan arah agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan. Selanjutnya tujuan dari semua itu adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan

kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan meliputi :

i. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual.
ii. Pelayanan kesehatan
iii. Pelayanan kesempatan kerja
iv. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
v. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum
vi. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
vii. Perlindungan sosial
viii. Bantuan sosial

Menurut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang dimaksud dengan Lanjut Usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi maupun aspek kesehatan. Ditinjau dari aspek kesehatan, kelompok lansia akan mengalami penurunan derajat kesehatan, baik secara alamiah maupun akibat penyakit sehingga diperlukan pendekatan khusus bagi kelompok lansia dan upaya perbaikan kualitas kesehatan secara berkelanjutan.

2.1.2. Teori Lanjut Usia

Dalam perspektif fungsionalis berkembang paling tidak ada enam teori sosiologi lansia yaitu teori penarikan diri, teori aktivitas, teori kontinuitas, teori peran sosial, teori stratifikasi usia, dan teori modernisasi (Damsar & Indrayani, 2022) .

a. Teori Penarikan Diri

Teori penarikan diri (disengagement theory) menganalisis tentang bagaimana masyarakat mengantisipasi masalah yang muncul ketika lansia meninggalkan posisi, tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka. Adapun gagasan teoretis yang mendasarinya adalah bahwa lansia, karena kemunduran yang tak terhindarkan seiring bertambahnya usia, menjadi semakin aktif dengan dunia luar dan semakin sibuk dengan kehidupan batin mereka. Penarikan diri berguna bagi masyarakat karena mendorong pemindahan kekuasaan yang teratur dari orang yang lebih tua ke yang lebih muda.

Teori penarikan diri diteroka oleh Elaine Cumming dan William Henry melalui buku mereka berjudul Growing Old, the Pro cess of Disengagement. Pensiun atau penarikan diri merupakan fungsional bagi masyarakat karena ia memiliki fungsi positif bagi keberlangsungan masyarakat melalui alih generasi terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Manakala lansia memasuki usia pensiun, maka generasi baru sudah disiapkan untuk menerima posisi, tugas, dan tanggung jawab dari lansia. Sehingga generasi baru tersebut memiliki kompetensi, kapabilitas, dan keahlian yang diisyaratkan oleh posisi, tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang akan mereka emban.

Teori penarikan diri merupakan teori sosiologi lansia yang berakar dari perspektif fungsionalis. Teori ini dikritik karena dalam kenyataannya lansia tidak menarik diri dalam peran sosial produktif dan membenamkan diri dalam ketiadaan, melainkan menggantikan peranperan lama menjadi peran baru yang lebih bersifat spiritual, humanis, dan karitas.

b. Teori Aktivitas

Teori aktivitas (activity theory) dibangun atas asumsi: satu, bahwa lansia yang aktif lebih terpuaskan dan lebih baik penyesuaian dirinya dibandingkan daripada mereka yang tidak aktif; dua, konsep diri lansia divalidasi melalui partisipasi dalam peran yang memiliki karakteristik usia dewasa, dan lansia karenanya harus mengganti peran yang hilang dengan yang baru untuk mempertahankan posisi mereka di tengah masyarakat. Jadi, teori ak tivitas, dikembangkan oleh Robert Havighurst, mengalkulasi berapa banyak aktivitas para lansia dalam berbagai dimensi: kegiatan-kegiatan formal versus informal, sendiri versus secara bersama, dan sebagainya. Serta berapa derajat kepuasan dari berbagai kegiatan yang dilakukan mereka (Bcngtson dan Haber, 1975).

Teori aktivitas dikritik karena tidak selalu para pensiun yang terlalu aktif merasa sangat puas dengan hal tersebut. Juga tidak selalu kegiatan informal yang dilakukan secara bersama lebih memuaskan dibandingkan dengan aktivitas formal. Tergantung dengan konteks dan habitus dari suatu komunitas. Teori aktivitas ini, seperti juga teori penarikan diri, berakar dari perspektif fungsional. Karena teori ini menegaskan perlunya pemenuhan persyaratan fungsional berupa penggantian aktivitas lama ke dalam aktivitas baru sehingga masyarakat akan fungsional.

c. Teori Kontinuitas

Teori kontinuitas (continuity theory) memiliki asumsi dasar bahwa ciri kepribadian sentral menjadi lebih jelas dengan usia atau dipertahankan melalui kehidupan yang sedikit terjadi perubahan. Lansia berhasil jika mereka mempertahankan peran yang mereka sukai dan teknik adaptasi sepanjang hidup.

Teori kontinuitas, oleh karena itu, merupakan teori tentang bagaimana keberlanjutan perjalanan hidup manusia melalui adaptasi mereka dengan penuaan. Mereka beradapasi dengan penuaan dengan melanjutkan sebagian peran yang mereka miliki, karena mereka memiliki peran majemuk, seperti sebagai guru, ibu, anggota arisan kompleks perumahan, pengurus ikatan kekeluar gaan dari suatu etnik, misalnya. Menurut Henslin (2008; 73) mereka yang memiliki peran majemuk dan sumber daya yang banyak memiliki adaptasi yang tinggi terhadap proses penuaan. Hal itu bisa dipahami ketika orang yang memiliki peran majemuk, ketika suatu peran hilang, misalnya peran guru pada permisalan, maka peran lain bisa menutupi keberlanjutan perjalanan hidup tanpa ke hilangan arah atau merasakan ketiadaan.

Teori kontinuitas, seperti dua teori sebelumnya, juga tergolong teori sosiologi lansia dalam perspektif fungsionalis. Teori ini melihat masyarakat fungsional bila kontinuitas peran berlangsung dalam masyarakat. Adapun kritik terhadap teori ini terkait dengan cakupan teori ini terlalu luas, sehingga mengabaikan pengalaman signifikan yang diperkirakan mempengaruhi adaptasi.

d. Teori Peran Sosial

Teori peran sosial (*social role theory*) mengasumsikan: satu, adanya seperangkat aturan, peraturan, dan peran; dua, bahwa setiap usia

individu akan mengalami perubahan (adaptasi) terhadap sejumlah peran sosial yang dimiliki individu dan bagaimana hal itu dilaksanakan. Di sini peran dikonseptualisasikan dalam pengertian Parsonian dan didefinisikan dalam pengertian harapan peran dan orientasi peran. Peran adalah bagian dari tatanan normatif masyarakat dan merupakan penentu kuat terhadap perilaku, karena ada sanksi terhadap penyimpangan dari “harapan sosial”. Peran sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menduduki status sosial tertentu (juga digunakan konsep posisi sosial), dalam hal ini status sosial sebagai lansia. Dalam kenyataannya dunia sosial merupakan entitas yang kompleks dan oleh sebab itu setiap individu tidak hanya memiliki satu peran saja, melainkan sebaliknya memiliki banyak peran untuk dimainkan secara bersamaan. Seseorang dapat terlibat dalam ibu, guru, peran pasangan, saudara kandung atau pengurus ikatan kedaerahan pada saat yang bersamaan. Semua peran ini menekankan aspekaspek yang berbeda dari masingmasing individu.

Dalam arti luas, peran sosial yang bersaing berbeda dalam tiga cara utama: satu, peran akan menekankan kualitas yang berbeda. Beberapa peran didefinisikan dalam hal tugas yang dilakukan, seperti peran pekerja, sementara yang lain didefinisikan lebih dalam hal konten emosional, seperti istri atau suami; dua, peran sosial bervariasi dalam jenis penghargaan yang ditawarkan, seperti uang, prestise, status, dukungan emosional atau kepuasan; tiga, peran dievaluasi sesuai dengan nilainilai masyarakat. Sebagai contoh, peran lansia dalam masyarakat perkotaan industrial dipandang memiliki nilai yang tidak tinggi dengan masyarakat perdesaan pertanian, misalnya.

Kritik terhadap teori ini adalah gagasan peran sosial merupakan bidang dari dunia sosial yang kompleks dan dinamis dunia sosial. Dalam usaha untuk memahami kehidupan lansia diperlukan kemampuan mengintegrasikan pemahaman tentang peran berbeda yang dimainkan oleh lansia dan bagaimana mereka memahaminya.

e. Teori Stratifikasi Usia

Teori stratifikasi usia (age stratification theory) memiliki tiga asumsi dasar, yaitu: satu, makna usia dan posisi kelompok usia dalam konteks sosial tertentu; dua, transisi yang dialami individu selama siklus hidup karena definisi sosial usia tersebut; dan tiga, mekanisme untuk alokasi peran antarindividu.

Riley (1971) berpendapat bahwa setiap kelompok usia (muda, usia menengah, dan tua) dapat dianalisis berdasarkan peran yang dimainkan oleh anggota kelompok tersebut dalam masyarakat dan bagaimana hal ini dihargai. Misalnya dalam bidang pekerjaan, pekerja dapat diklasifikasikan sebagai “lebih tua” dan “lebih muda” dan yang terakhir bernilai lebih tinggi karena mereka merasakan produktivitas, inovasi, dan vitalitas yang lebih besar. Penggunaan usia kronologis dalam membimbing alokasi peran sosial mungkin bersifat universal untuk semua budaya, tetapi sifat yang tepat dari normanorma usia ini mencerminkan budaya, sejarah, nilainilai dan struktur masyarakat tertentu. Sebagai contoh, selama abad ke20 ada banyak variasi dalam beberapa aspek siklus hidup. Mengasuh dan membesarkan anak sekarang terbatas pada periode yang jauh lebih pendek dari sebelumnya ketika perempuan “aktif se cara reproduktif” selama dua puluh lima hingga tiga puluh ta hun. Ini telah dicocokkan oleh penciptaan dan peningkatan durasi fase sarang kosong (the empty nest

phase) dari siklus hidup. Demikian pula, dalam masyarakat tertentu ukuran, komposisi dan sejarah kelompok tertentu memengaruhi baik waktu dan urutan peristiwa kehidupan utama. Keberadaan layanan nasional wajib akan ‘menunda’ transisi kehidupan utama seperti pernikahan, pergi ke universitas atau memulai karier.

Normanorma usia dalam perilaku tersebut, lanjut Riley (1971), mungkin berasal dari tradisi, keteraturan faktual atau negosiasi. Apa pun asalnya, mereka didasarkan pada asumsi, baik eksplisit maupun implisit, tentang kemampuan dan keterbatasan terkait usia. Normanorma ini mungkin, bagaimanapun, bervariasi menurut kelas sosial, etnis atau jenis kelamin, secara historis atau budaya. Misalnya, anggota kelas pekerja biasanya menikah pada usia yang lebih muda daripada anggota kelas profesional. Demikian pula, usia pada pernikahan pertama biasanya lebih tua untuk lakilaki daripada perempuan. Karena variasi ini, norma usia memiliki realitas dan makna yang berbeda untuk berbagai kelompok sosial. Meskipun demikian, usia adalah kriteria universal untuk alokasi peran. Penggolongan usia peran dalam sistem stratifikasi usia menciptakan perbedaan usia dan ketidaksetaraan. Setiap kelompok usia dievaluasi, baik dengan sendirinya dan orang lain di masyarakat, dalam hal nilai sosial yang dominan. Evaluasi peran yang berbeda ini akan menghasilkan distribusi kekuatan dan prestise yang tidak merata di seluruh kelompok umur. Jadi, ketika masyarakat menghargai akumulasi pengalaman dan kebijaksanaan dari yang lama, dan memungkinkan mereka untuk mengambil peran yang memanfaatkan pengalaman ini, maka orang yang lanjut usia akan diberikan posisi yang terhormat.

Teori stratifikasi usia dikritik karena terlalu makro, sementara lansia dipertimbangan memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, sehingga

kemampuan lasia sebagai aktor yang dapat melakukan sesuatu dan memiliki kepentingan tertentu diabaikan oleh teori ini.

f. Teori Modernisasi

Teori modernisasi memiliki asumsi dasar bahwa masyarakat bergerak dari daerah perdesaan pertanian menuju daerah perkotaan industrial. Pergerakan ini menyebabkan posisi lansia memburuk karena urbanisasi dan industrialisasi bergabung untuk melemahkan keluarga besar dan menggantinya dengan keluarga inti sebagai unit utama masyarakat dan mengisolasi lansia, baik masyarakat maupun keluarga.

Posisi lansia dalam masyarakast praindustri biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang penuh dengan rasa hormat dan otoritas. Biasanya, masyarakat praindustri digambarkan sebagai “zaman keemasan” dari penuaan dan lansia, meskipun setiap tahap dalam sejarah tampaknya melihat kembali ke masa keemasannya sendiri. Pandangan stereotip tentang masa lalu ini biasanya bertolak belakang dengan posisi mereka dalam masyarakat modern di mana lansia dianggap lebih buruk karena mereka dipandang sebagai pensiunan yang tiada berguna, diabaikan oleh keluarga mereka dan dipinggirkan oleh budaya anak muda yang sedang berlaku.

Cowgill dan Holmes (1972), sebagai peneroka teori modernisasi dalam teori sosiologi lansia, mengembangkan empat parameter dalam proses modernisasi, yaitu: perbaikan dalam teknologi medis, aplikasi untuk ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, urbanisasi, serta pendidikan massal. Atas landasan itu, Cowgill dan Holmes berpendapat bahwa perbaikan dalam perawatan kesehatan menyebabkan perpanjangan dari proses penuaan penduduk. Penurunan potensi kematian menghasilkan

penuaan penduduk yang bekerja dan penurunan kesempatan kerja bagi kaum muda. Jadi, ketegangan antargenerasi diciptakan oleh kompetisi untuk pekerjaan. Pensiun kemudian menjadi pengganti sosial untuk kematian dan menciptakan peluang kerja bagi kaum muda. Namun dominasi etos kerja yang berlaku menghasilkan “devaluasi” dari pensiun. Selain itu, perkembangan ekonomi dan teknologi mendevaluasi keterampilan ketenagakerjaan yang lama. Urbanisasi menarik orangorang muda dari daerah perdesaan, yang mengakibatkan pecahnya keluarga besar. Akhirnya, pengembangan pendidikan massa mengurangi daya tahan yang dimiliki orangtua terhadap orang yang lebih muda. Perubahan dalam empat faktor ini berkontribusi, dikatakan Cowgill dan Holmes (1972), untuk penurunan status lansia dalam masyarakat modern.

Dalam lingkungan sosial yang berkembang seperti itu, kaum muda dan kemajuan disanjungsanjung. Sementara tradisi dan pengalaman dari lansia dilihat sebagai tidak relevan. Kekuatan dan gengsi mereka yang berkurang tersebut menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Lansia secara sosial dan fisik ditinggalkan dan hidup di pinggiran masyarakat secara marginal. Kritik teori modernisasi melihat masyarakat praindustri dan industri sebagai masyarakat homogen sehingga mengilustrasikan keseragaman dalam atribut yang ditampilkan lanjut usia.

2.2. Kerawanan Pangan

2.2.1 Konsep Kerawanan pangan dan Ketahanan pangan

Ketahanan pangan sebagai sebuah konsep baru yang muncul pada pertengahan tahun 1970-an, dalam diskusi tentang masalah pangan

internasional pada saat terjadi krisis pangan global. Fokus perhatian awal pembahasan terkait dengan persediaan pangan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok di tingkat internasional dan nasional pada tingkatan tertentu (ODI, 1997). Saat itu, ketahanan pangan didefinisikan dalam KTT Pangan Dunia 1974 sebagai ketersediaan setiap saat pasokan pangan dunia yang memadai dari bahan makanan pokok untuk mempertahankan konsumsi pangan yang stabil dan untuk mengimbangi fluktuasi produksi dan harga (UN, 1974). Kemudian pada tahun 1983, FAO memperluas konsepnya dengan memasukkan unsur aksesbilitas terhadap orang-orang yang rentan terhadap persediaan pangan yang tersedia, yang menyiratkan bahwa perhatian harus seimbang antara sisi permintaan dan penawaran dari ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan berubah menjadi "memastikan bahwa semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan pokok yang mereka butuhkan" (FAO, World Food Security: a Reappraisal of the Concepts and a Reappraisal of the Concepts and Approaches., 1983). Selanjutnya pada tahun 1986, salah satu laporan World Bank yang berjudul "Poverty and Hunger" berfokus pada dinamika kerawanan pangan temporal. Laporan ini memperkenalkan antara kerawanan pangan kronis yang terkait dengan masalah kemiskinan berkelanjutan/struktural dan pendapatan rendah, serta kerawanan pangan sementara, yang melibatkan periode tekanan intensif yang disebabkan oleh bencana alam, krisis ekonomi atau konflik. Konsep ketahanan pangan kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi akses semua orang setiap saat terhadap makanan yang cukup untuk kehidupan yang aktif dan sehat (World Bank, 1986).

Pada pertengahan tahun 1990-an, konsep ketahanan pangan mulai diakui dan mendapat perhatian. Namun, konsep akses untuk mendapatkan

makanan yang cukup, menunjukkan kekhawatiran berkelanjutan dengan adanya kemungkinan kekurangan energi protein. Definisi tersebut kemudian diperluas untuk memasukkan keamanan pangan dan juga keseimbangan nutrisi, yang mencerminkan kekhawatiran tentang komposisi makanan dan kebutuhan nutrisi minimum untuk bisa menjalani kehidupan secara aktif dan sehat. Selain itu, preferensi makanan yang ditentukan secara sosial atau budaya juga menjadi pertimbangan (FAO, Trade Reforms And Food Security: Conceptualizing the Linkages., 2003). Pada KTT Pangan Dunia 1996, definisi ketahanan pangan didefinisikan lebih kompleks lagi, yaitu ketahanan pangan pada tingkat individu, rumah tangga, nasional, regional, dan global akan tercapai ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan mereka untuk dapat hidup secara aktif dan sehat (FAO, 1966).

Definisi ketahanan pangan kembali disempurnakan dalam The State of Food Insecurity pada tahun 2001 dan digunakan sampai saat ini sebagai kondisi yang terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan mereka untuk dapat hidup secara aktif dan sehat (FAO, The State of Food Insecurity in the World, 2022). Definisi lain mengatakan bahwa, tidak hanya mencakup kebutuhan terhadap status gizi seseorang saat ini, tetapi juga menangkap kerentanan terhadap gangguan di masa yang akan datang dalam hal akses ke makanan yang memadai dan layak (Barret, 2010). Selain itu, definisi tersebut juga memperkuat sifat multidimensi dari ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan Ketersediaan pangan berarti

tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang sesuai, yang dipasok melalui produksi dalam negeri atau impor (termasuk bantuan pangan). Akses mengacu bagaimana individu dapat menjangkau ke sumber daya yang memadai (hak) untuk memperoleh makanan yang sesuai dan bergizi, baik akses secara ekonomi maupun fisik. Pemanfaatan pangan berkaitan dengan bagaimana individu atau rumah tangga dapat memanfaatkan pangan sebagaimana semestinya. Dimensi terakhir adalah stabilitas pangan Untuk mencapai ketahanan pangan, maka rumah tangga atau individu harus memiliki akses terhadap pangan yang cukup setiap saat. Mereka tidak boleh mengambil risiko kehilangan akses terhadap pangan sebagai akibat dari guncangan mendadak atau peristiwa lainnya (FAO, Food Security. Policy Brief June 2006, Issue 2, 2006).

Pada level nasional, ketahanan pangan didefinisikan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Pada dasarnya, konsep ketahanan pangan dapat digambarkan sebagai fenomena yang berkaitan dengan kondisi individu. Sementara itu, ketahanan pangan rumah tangga adalah penerapan konsep di tingkat keluarga, dengan individu di dalam rumah tangga sebagai fokus perhatian. Ketahanan pangan juga didefinisikan (Campbell, 1991) sebagai akses semua orang setiap saat untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk dapat hidup aktif dan sehat dan paling sedikit meliputi: 1) ketersediaan pangan yang cukup bergizi dan aman; serta 2) terjaminnya kemampuan untuk memperoleh akses terhadap makanan yang dapat

diterima secara pribadi dengan cara yang dapat diterima secara sosial (misalnya tanpa menggunakan persediaan makanan darurat, mengais-ngais, mencuri, atau strategi penanggulangan lain Sebaliknya, kerawanan pangan terjadi ketika ketersediaan makanan yang aman dan bergizi atau kemampuan untuk memperoleh makanan yang dapat diterima secara pribadi dengan cara yang dapat diterima secara sosial terbatas atau tidak pasti (Campbell, 1991). Dengan kata lain, kerawanan pangan adalah batasan atau ketidakpastian tentang ketersediaan atau kemampuan untuk memperoleh makanan. Leroux (2018) menjelaskan bahwa kerawanan pangan sebagai suatu permasalahan sosial yang serius dan merupakan masalah kesehatan masyarakat. Definisi kerawanan pangan juga dijelaskan oleh Wolfe, et al. (1996) sebagai ketidakmampuan untuk memperoleh atau mengonsumsi makanan dengan kualitas yang memadai atau jumlah yang cukup yang sesuai untuk kesehatan seseorang dengan cara yang dapat diterima secara sosial atau ketidakpastian bahwa seseorang akan mampu melakukannya.

Rawan pangan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu pada suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan konsumsi pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat (Badan Ketahanan Pangan, 2019).

2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kerawanan Pangan Lansia

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan pangan pada lansia diantaranya sebagai berikut :

a. Usia

Terdapat 4 tahap batasan umur menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), diantaranya : usia pertengahan (*middle age*), usia lanjut (*elderly*), usia lanjut tua (*old*), dan usia sangat tua (*very old*). Berdasarkan batasan umur tersebut, dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun atau lebih. Secara alami dengan bertambahnya usia khususnya untuk usia diatas 45 tahun (batasan lansia menurut Dinas Kesehatan) akan mengalami penurunan fungsi atau kemampuan organ-organ tubuh. Penurunan fungsi organ tubuh ini akan lebih dirasakan pada usia diatas 60 tahun (Depkes, 2012). Sedangkan lansia yang telah memasuki usia 70 tahun ialah lansia dengan resiko tinggi. Biasanya akan mengalami penurunan dalam berbagai hal termasuk tingkat kemandirian dalam aktivitas sehari-hari (Maryam, 2008).

b. Imobilitas

Pengertian Imobilitas adalah ketidakmampuan untuk bergerak secara aktif akibat berbagai penyakit atau impairment (gangguan pada alat organ tubuh) yang bersifat fisik atau mental (Lueckenotte, 1998).

c. Kebahagiaan

Kebahagiaan merupakan hal penting yang ingin dirasakan semua lansia. Menurut Hurlock (dalam (Nurhidayah & Agustini, 2012) kebahagiaan dapat diartikan sebagai keadaan sejahtera dan kepuasan hidup dimana individu yang terpenuhi kebutuhan dan keinginannya akan merasakan kegembiraan. Lebih lanjut (Subandi & irianto, 2015) menjelaskan bahwa kebahagiaan bersifat individual yaitu setiap individu

memiliki penilaian yang berbeda-beda tergantung pandangan individu tersebut tentang bagaimana kebahagiaan. Perbedaan pandangan dan penilaian lansia tentang kebahagiaan merujuk pada kesejahteraan subjektif yang akan dicapai. Kebahagiaan menurut Diener yaitu memiliki istilah ilmiah dari kesejahteraan subjektif (*subjective well being*). Kesejahteraan subjektif dapat di defenisikan sebagai evaluasi kognitif dan efektif dalam kehidupan. Evaluasi kognitif orang bahagia adalah merupakan bagian dari kepuasan hidup yang serba tinggi atau berlebihan. Sedangkan evaluasi efektif adalah banyaknya efek positif dan sedikitnya efek negatif yang dirasakan dalam kehidupan. Adapun makna dari subjective *well being* mengandung arti yaitu dimensi dari kepuasan hidup serta perasaan positif. Sebagaimana halnya vitalitas dan perasaan nyaman. Sebab itulah, kebahagiaan diartikan sebagai kepuasan hidup oleh setiap individu (Karni, 2018). Hal tersebut memiliki arti bahwa kesejahteraan subjektif lansia merupakan gambaran tentang kualitas hidup dan kepuasan lansia secara keseluruhan.

Kebahagiaan itu sendiri bukan hanya bersumber dari uang. Adapun sumber kebahagiaan lain terutama pada lansia antara lain

1. Kebahagiaan bisa diraih dengan liburan bersama

Alasan pertama adalah kebahagiaan bisa diraih dengan liburan bersama. Kita harus tahu bahwa dengan liburan juga bisa memberi kesenangan buat seseorang. Kebahagiaan itu bukan hanya bisa diraih dengan uang tetapi bisa dengan liburan atau berwisata.

2. Kebahagiaan bisa diraih dengan perhatian

Alasan kedua adalah kebahagiaan bisa diraih dengan perhatian. Harus kita akui bahwa dengan perhatian dari orang yang kita cintai maka itu akan

memberikan senyuman indah, tawa dan hati yang begitu berbahagia. Uang tidak bisa membeli perhatian dari orang tersayang, terutama anak.

d. Dukungan sosial

Menurut Hayati (2010) dukungan sosial adalah pemberian kenyamanan, perhatian dan penghargaan yang dapat diandalkan ketika individu membutuhkannya. Lebih lanjut Kusrini & Prihartanti (2014) menyatakan bahwa dukungan sosial dapat diartikan sebagai suatu bantuan berupa kesenangan, perhatian, penghargaan, cinta yang diterima seseorang melalui hubungan formal dan informal dengan orang lain yang ada disekitar dan kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut dukungan sosial dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang berguna bagi individu yang diperoleh dari orang yang dapat dipercaya.

Menurut Sarafino Kusrini & Prihartanti (2014) mengemukakan bahwa dukungan sosial yang diberikan orang–orang terdekat dari individu memiliki berbagai bentuk yaitu:

1. Dukungan instrumen sebagai bantuan dalam wujud langsung yang berupa fisik
2. Dukungan informasi sebagai bantuan yang berupa masukan, umpan balik atau keterangan.
3. Dukungan penghargaan sebagai bantuan yang berupa pernyataan positif terhadap pendapat, pernampilan, dan perasan seseorang.
4. Dukungan emosional sebagai bantuan yang berupa rasa empati dan perhatian yang membuat seseorang merasa nyaman.

Berbagai macam bentuk dukungan sosial yang telah dijelaskan dapat diperoleh dari beberapa sumber. Menurut Goetlieb (dalam Kusrini & Prihartanti, 2014) menjelaskan terdapat dua macam sumber dukungan sosial yaitu: pertama hubungan profesional yang bersumber dari para ahli

dibidangnya seperti konselor, psikiater, psikolog, dokter, pengacara, kedua hubungan non profesional yang berasal dari orang-orang yang berada disekitar individu seperti keluarga, teman, maupun lingkungan sosial.

Abraham Maslow (1970) dalam bukunya Hierarchy Of Needs menggunakan istilahaktualisasi diri (self actualization). Karyawan yang dapat mengaktualisasikan dirinya maka dalam bekerja lebih mampu melihat potensi dalam dirinya lebih baik dan menerima keadaan lingkungan disekitarnya secara spontan. Bisa disimpulkan bahwa aktualisasi diri merupakan cara seseorang menggunakan ketrampilan, kemampuan dan potensi secara maksimal untuk memperoleh prestasi kerja yang ingin diraih oleh seseorang maupun organisasi dan sebaliknya jika seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya maka tidak terjadi kinerja yang tinggi..

Dalam masyarkat agraris,saat usia sudah lanjut, mereka bisa tetap bekerja dengan keluarga sesuai dengan kemampuan mereka. Banyak permasalahan yang sering dihadapi lansia, secara fisik mereka akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh, seperti berkurangnya kepekaan panca indera, menurunnya sistem kerja otot, gerakan fisik menjadi lamban, dan aktivitas berkurang. Melihat kemampuan para lansia yang sudah berkurang menjadikan mereka sering mendapat perlakuan atau penilaian sebagai orang yang kurang berguna. Oleh karena itu, banyak lansia yang kemudian berusaha tetap tampil dan aktif melalui aktualisasi diri mereka di masayarakat baik dalam bentuk tetap bekerja maupun ikut dalam kegiatan-kegiatan di masayarakat. Salah satu sumber yang dapat menyumbang peran dukungan sosial adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial secara langsung dapat mempengaruhi individu dalam melakukan tindakan serta perubahan perilaku individu. Menurut Sanjaya & Rusdi (2012) menyatakan

hubungan individu dengan lingkungan sosialnya dapat memberikan semangat dan saling berbagi mengenai masalah yang mereka alami.

e. Rasa aman

Maslow (dalam Potter & Perry, 2005) mendefinisikan rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan. Rasa aman merupakan sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Kebutuhan rasa aman tidak sebatas pada keamanan fisik, melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologis yang di dalamnya berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya. Selain itu, Maslow (2010) berpendapat bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis.

Teori Mashlow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang. Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan yang telah dipenuhi memberi motivasi. Apabila seseorang memutuskan bahwa ia menerima uang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia bekerja, maka uang tidak mempunyai daya intensitasnya lagi. Jadi bila suatu kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. Kemudian kebutuhan kedua mendominasi, tetapi walaupun kebutuhan

telah terpuaskan, kebutuhan itu masih mempengaruhi perilaku hanya intensitasnya yang lebih kecil (Maslow, 2007:2)

f. Kesehatan

Hak kesehatan bagi seseorang merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi dan dinikmati oleh individu manusia yang hidup di muka bumi ini. Menurut definisi WHO tersebut, hak pelayanan kesehatan berlaku untuk semua orang termasuk lansia, meskipun tidak ada penyebutan hak pelayanan kesehatan bagi lansia secara spesifik. Menjamin hak pelayanan kesehatan bagi lansia yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia semestinya dilindungi oleh undang - undang.61 Hak pelayanan kesehatan bagi lansia tersebut sama halnya dengan hak – hak lainnya, seperti hak sipil dan politik. Oleh karena itu, semua Hak Asasi Manusia saling berkaitan, saling bergantung, dan tidak dapat dicabut.

g. Perbedaan karakteristik masyarakat pedesaan dan perkotaan

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri, atau desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi ,sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Suatu pedesaan masih sulit umtuk berkembang, bukannya mereka tidak mau berkembang tapi suatu hal yang baru terkadang bertentangan dengan apa yang leluhur mereka ajarkan karna itu masyarakat pedasaan sangat tertutup dengan hal-hal yang baru karena mereka masih memegang teguh adat-adat yang leluhur mereka ajarkan

Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk membedakan antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan

perbedaan yang ada mudah mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan apakah suatu masyarakat dapat disebut sebagi masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan.

Ciri ciri tersebut antara lain :

1. Jumlah dan kepadatan penduduk
2. Lingkungan hidup
3. Mata pencaharian
4. Corak kehidupan sosial
5. Stratifiksi sosial
6. Mobilitas sosial
7. Pola interaksi sosial
8. Solidaritas sosial
9. Kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional.

h. Kemandirian Lansia

Kemandirian Lansia Menurut (Mu'tadin, 2002), kemandirian mengandung pengertian yaitu suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Fungsi kemandirian pada lansia mengandung pengertian yaitu kemampuan yang dimiliki oleh lansia untuk tidak bergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitasnya, semua dilakukan sendiri dengan keputusan sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Alimul, 2004).

Kemandirian lansia di definisikan sebagai kemandirian seseorang dalam melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan harian yang dilakukan oleh

manusia baik secara rutin dan universal (Sari, 2013). Kemandirian merupakan sikap individu diperoleh secara komulatif dalam perkembangan dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu mampu berpikir dan bertindak sendiri. Dengan kemandirian seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk berkembang menjadi lebih baik (Husain, 2013). Kemandirian lansia didefinisikan sebagai kemandirian seseorang dalam melakukan aktivitas dan fungsi-fungsi kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dengan teratur (Ediawati, 2013).

2.2.3 Indikator kerawanan pangan lansia

Setelah lansia mengalami keterbatasan sumber daya untuk mendapatkan makanan, kerawanan pangan pada lansia pada gilirannya ditandai oleh empat tahap yang semakin parah (Wolfe, Olson, Kendall, & Frongillo, 1998), yaitu:

a. Kualitas dan variasi jenis makanan yang terganggu serta kemampuan yang terbatas untuk mendapatkan makanan yang direkomendasikan untuk masalah kesehatan. Kualitas dan variasi jenis makanan yang dikompromikan merupakan tahap paling awal dan paling ringan dari kerawanan pangan. Banyak lansia mengatakan bahwa mereka memiliki cukup makanan, tetapi mereka tidak mampu membeli kualitas atau variasi yang mereka sukai. Para lansia tersebut tidak mampu membeli atau hanya mampu membeli makanan dalam jumlah terbatas yang seharusnya mereka makan untuk kondisi kesehatannya. Kualitas makanan yang dikompromikan termasuk juga ketika harus makan hal yang sama selama beberapa hari berturut-turut.

b. Timbulnya kecemasan atau ketidakpastian terhadap sumber daya pangan dan strategi pengelolaan pangan. Sarana perolehan makanan yang tidak memadai dapat mengakibatkan kompromi dalam kualitas makanan dan memunculkan ketidakpastian atau perasaan cemas tentang sumber makanan mereka, strategi pengelolaan makanan, atau bahkan keduanya. Terlebih lagi bagi lansia yang menjalani diet karena kondisi kesehatan atau bagi mereka yang mengalami gangguan fungsional akan bergantung kepada orang lain untuk memperoleh dan menyiapkan makanannya.

c. Lansia harus menggunakan strategi pengelolaan makanan yang tidak diterima secara sosial. Pada tahap ini, para lansia harus makan dengan cara yang tida dapat diterima secara sosial, termasuk makan oatmeal atau bubur karena kurangnya uang untuk membeli makan pada suatu waktu. Lansia yang mengalami tahap ini kadang-kadang disebabkan oleh adanya biaya-biaya yang tidak terduga (misalnya tagihan medis, perbaikan rumah, dsb.), atau pada kondisi-kondisi tertentu seperti akhir bulan. Tahap ini juga mencakup pengurangan porsi yang harus dimakan para lansia.

d. Lansia harus menggunakan strategi darurat. Tahap berikutnya dari kerawanan pangan lansia melibatkan bantuan dari orang lain karena lansia mengalami masalah dalam pangannya. Kondisi ini melibatkan penggunaan strategi pengelolaan makanan darurat di luar cara yang biasa mereka lakukan. Strategi-strategi seperti ini tampaknya kurang dapat diterima dan hanya digunakan ketika strategi-strategi dalam rumah tangga yang biasa tidak lagi memadai. Strategi darurat ini termasuk meminta uang atau makanan dari anak-anak atau kerabat lainnya. Tahap terakhir dari

perkembangan kerawanan pangan lansia yang merupakan konsekuensi dari kerawanan pangan paling parah, yaitu dapat menyebabkan kelaparan yang digambarkan dengan tidak memiliki makanan sama sekali.

Terdapat beberapa indikator untuk memantau kerawanan pangan dari berbagai aspek (FAO, The Food Insecurity Experience Scale: Measuring food insecurity through people's experiences., 2017), diantaranya prevalensi kekurangan gizi/prevalence of undernourished (PoU) dan prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah. PoU menggambarkan perkiraan kecukupan asupan energi makanan dalam suatu populasi berdasarkan perkiraan ketersediaan pangan, konsumsi pangan, dan kebutuhan energi. Namun demikian, perkiraan PoU ini tidak dapat mengidentifikasi karakteritik kerawanan pangan populasi kelompok rentan tertentu di dalam suatu negara. Selain itu, PoU membutuhkan perhitungan yang rumit dan bukan merupakan indikator langsung akses ke pangan pada tingkat rumah tangga atau individu (Ballard, Kepple, & Cafioero, 2013). Sebagai alternatif, terdapat ukuran lain yang mampu memperkirakan persentase penduduk suatu negara yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pangan yang cukup aman dan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal serta kehidupan yang aktif dan sehat berdasarkan pengalaman yang mereka alami secara langsung, yaitu menggunakan ukuran prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah yang diukur dengan skala pengalaman kerawanan pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES). FIES sangat selaras dengan Target SDGs 2.1 karena menghasilkan indikator yang mengukur kesejahteraan rakyat dalam hal akses terhadap makanan. FIES adalah

metrik dari keparahan kerawanan pangan di tingkat rumah tangga atau individu yang bergantung pada jawaban langsung ya/tidak terhadap delapan pertanyaan singkat mengenai akses mereka terhadap pangan yang memadai, baik pada tingkatan individu maupun rumah tangga yang disebabkan ketidakmampuan mengakses makanan karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya (Cafiero, Viviani, & Nord, 2017). Sumber daya lainnya yang dimaksud mengacu pada kondisi kurang tersedianya sarana lain yang biasa dimanfaatkan untuk mendapatkan makanan (Herlina dkk., 2020).

Rumah tangga bisa mendapatkan makanan secara langsung melalui produksi atau secara tak langsung melalui pertukaran (jual-beli) dan bantuan dari pihak luar (Holmes dkk., 2015). Kedelapan pertanyaan tersebut jika dianalisis bersama-sama akan membentuk butir-butir tes yang koheren untuk mengukur tingkat keparahan kerawanan pangan yang dialami pada populasi tertentu (Ballard et al., 2013). Konsep yang mendasari pengukuran ketahanan pangan berbasis pengalaman ini didasarkan pada studi etnografi untuk memahami pengalaman kelaparan. Penelitian di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pengalaman kerawanan pangan ditandai dengan: ketidakpastian dan kecemasan mengenai akses pangan dan perubahan dalam kualitas pola makan, seperti pola makan yang kurang seimbang dan lebih monoton. Dengan meningkatnya tingkat keparahan, kuantitas makanan yang dikonsumsi berkurang karena ukuran porsi berkurang, melewatkan makanan dan yang paling parah, seseorang terpaksa menjalani hidupnya tanpa makan apapun (Ballard et al., 2013; FAO, 2017). Pola yang sama juga terjadi pada studi etnografi tambahan yang bertujuan untuk memahami pengalaman

kelaparan dari perspektif orang tua di AS dan keluarga berpenghasilan rendah di Quebec, Kanada (Wolfe et al., 1998; (Wolfe, dkk, 2003). FIES berfokus pada perilaku dan pengalaman yang dilaporkan secara langsung terkait dengan meningkatnya kesulitan dalam mengakses makanan karena keterbatasan sumber daya. FIES didasarkan pada konstruksi yang kuat dari pengalaman kerawanan pangan yang terdiri atas tiga domain, yaitu ketidakpastian dan kekhawatiran tentang makanan, kualitas makanan yang tidak memadai, dan kuantitas makanan yang tidak mencukupi. Dari 3 domain ini, maka dapat terbentuk asumsi tingkat keparahan kerawanan pangan mulai dari ringan, sedang, dan parah. Selain mempertimbangkan kualitas makanan yang dikompromikan dan kuantitas makanan yang berkurang, FIES juga menangkap elemen psikososial terkait dengan kecemasan atau ketidakpastian mengenai kemampuan untuk mendapatkan makanan yang cukup, suatu aspek yang tidak dimiliki skala lainnya (Ballard et al., 2013). Dengan mengajukan serangkaian pertanyaan terkait yang menyusun FIES, dimungkinkan untuk mengklasifikasikan responden pada tingkat keparahan yang berbeda, yaitu “tahan pangan” (mereka yang menjawab “tidak” untuk semua pertanyaan tentang pengalaman terkait kerawanan pangan) atau “rawan pangan” sepanjang rangkaian keparahan kerawanan pangan

2.3. Kebijakan Sosial

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan sosial (social policy) khususnya dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda.

Hal ini disebabkan karena kebanyakan definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan Kata 'kebijakan' disini berorientasi pada tindakan dan berorientasi pada masalah. Kata “sosial” digunakan untuk merujuk pada tindakan pemerintah dalam mengekspresikan 'kehendak umum' masyarakat (Titmuss & Richard, 1974). Sedangkan menurut Kemendikbud Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Kemdikbud, 2006)

Kebijakan sosial juga dianggap sebagai rencana tindak (*plan of action*) yang prosesnya dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan (*assessing need*), penetapan alternatif-alternatif tindakan, penyeleksian strategistrategi kebijakan, sampai pada evaluasi terhadap pengimplementasian kebijakan (Wirata, 2022). Dalam implementasi sebuah kebijakan sosial, pemantauan dan evaluasi merupakan langkah yang penting dalam proses kebijakan dan perencanaan. Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksaakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undangundang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu,biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu

kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan,adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakasanaan tersebut. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Proses analisis kebijakan tidak berhenti pada implementasi kebijakan yang tampak berjalan dengan baik dan minim hambatan. Bahkan setelah suatu kebijakan diimplementasikan, masih ada keraguan mengenai; apakah sudah tepat, apakah permasalahan yang ada sudah teridentifikasi dengan tepat, apakah ada aspek penting dari permasalahan yang terabaikan, atau apakah kesimpulan atau rekomendasi kebijakan mungkin akan berbeda jika tersedia data yang lebih baik dan terkini. Dalam analisis cepat, beberapa variabel kebijakan mungkin harus dihilangkan; kondisi yang ada, dampak, hasil, dan kemungkinan efek samping hanya dapat diperkirakan; dan rekomendasi harus diperoleh dalam kondisi ketidakpastian. Selain itu, rekomendasi mungkin tidak dilaksanakan dengan baik. Kekhawatiran ini mengharuskan kita untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program untuk melihat apakah memungkinkan adanya alternatif yang tepat telah diterapkan, dan untuk menentukan apakah alternatif tersebut

mempunyai dampak yang diharapkan, apakah sebaiknya didesain ulang atau dimodifikasi, atau apakah itu harus dihentikan. Proses pemantauan tersebut juga harus menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam merancang alternatif yang lebih baik untuk analisis kebijakan di masa depan. Namun, upaya monitoring dan evaluasi seringkali menunjukkan bahwa suatu program tidak berjalan baik.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, yang juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, memegang peran krusial dalam proses penyusunan karya ilmiah. Tahapan ini melibatkan penyelidikan dan analisis terhadap literatur yang sudah ada dan terkait dengan topik penelitian. Pertama-tama, penelitian terdahulu memberikan dasar teoretis yang mendalam bagi penelitian yang sedang berlangsung. Dengan memahami konsep-konsep dan hasil temuan yang telah ada, peneliti dapat membangun kerangka teoretis yang kokoh, memahami kerangka kerja konseptual, dan mengenali variabel-variabel yang signifikan. Sebagai hasilnya, penelitian terdahulu membantu peneliti untuk memahami konteks dan perkembangan terkini dalam bidang studi mereka.

Penelitian terdahulu juga berperan penting dalam membantu peneliti mengidentifikasi kekosongan pengetahuan atau ketidakcukupan dalam literatur yang ada. Dengan merinci literatur yang sudah diterbitkan, peneliti dapat menemukan area-area di mana pengetahuan masih terbatas atau memerlukan penelitian lebih lanjut. Ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang penting dan relevan, membimbing fokus penelitian pada isu-isu yang belum terpecahkan atau memerlukan pemahaman lebih lanjut.

Lebih lanjut, penelitian terdahulu juga memiliki peran signifikan dalam merancang metodologi penelitian. Dengan mengevaluasi metode-metode yang

digunakan dalam penelitian sebelumnya, peneliti dapat memilih dan menguraikan metode penelitian yang sesuai dan efektif untuk pertanyaan penelitian mereka. Ini membantu menghindari pengulangan penelitian yang sudah ada, memastikan bahwa metode yang digunakan relevan, dan meningkatkan validitas serta reliabilitas penelitian yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penelitian terdahulu membentuk landasan yang kuat untuk memberikan kontribusi penelitian yang baru dan berharga dalam suatu bidang studi

Penelitian terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kerawanan pangan telah banyak dilakukakan oleh beberapa peneliti, baik dilingkup wilayah perdesaan maupun perdesaan, dan baik di dalam maupun di luar negeri. Sumber data yang digunakan pun beraneka ragam meliputi dari sumber data primer, data sekunder, atau gabungan keduanya. Jenis penelitian juga ada yang berbentuk kualitatif, ada pula yang berbentuk penelitian kuantitatif. Sementara itu, berbagai metode analisis yang digunakan juga cukup bervariasi sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan berfokus pada kebijakan terkait kerawanan ppangan lansia di Sulawesi Selatan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesejahteraan lansia adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Penelitian Terdahulu Terkait Kesejahteraan Lansia

No	Nama Peneliti (Tahun) Judul	Tujuan Penenlitian	Hasil Penelitian
1.	Dwi Prastiwi (2022) Kerawanan Pangan Lansia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang memengaruhinya	1. Mendeskripsikan tingkat kerawanan pangan lansia di Indonesia. 2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerawanan pangan lansia di Indonesia	Tingkat kerawanan pangan pada lansia secara signifikan dipengaruhi oleh variabel umur KRT lansia, jenis kelamin KRT lansia, pendidikan KRT lansia, kondisi kesehatan KRT lansia, status pengaturan hidup KRT lansia, daerah tempat tinggal KRT lansia, status ekonomi KRT lansia, dan penerimaan bantuan pangan. Berdasarkan nilai odds ratio, variabel status ekonomi mempunyai pengaruh paling besar terhadap tingkat kerawanan pangan lansia di Indonesia.
2.	Ni Made Ayu Sriastiti	1) hubungan faktor hubungan baik dengan	Faktor hubungan baik dengan anggota keluarga,

	dan I.K.G. Bendesa (2018) Analisis Determinan Kesejahteraan Lansia Di Kabupaten Tabanan	anggota keluarga terhadap kesejahteraan lansia di Kabupaten Tabanan; 2) hubungan faktor akses kesehatan terhadap kesejahteraan lansia di Kabupaten Tabanan; 3) hubungan faktor religiusitas terhadap kesejahteraan lansia di Kabupaten Tabanan; dan 4) hubungan faktor kondisi ekonomi terhadap kesejahteraan lansia di Kabupaten Tabanan.	akses kesehatan, religiusitas, dan kondisi ekonomi memiliki korelasi yang positif terhadap kesejahteraan lansia di Kabupaten Tabanan meski tidak signifikan, tetapi dalam keseluruhan model sudah signifikan
3.	Wilna Oldewage-Theron dan Abdulkadir A. Egal (2021). *Is food insecurity a problem among the elderly in Sharpeville, South Africa?*	1. Menentukan prevalensi kerawanan pangan dan gizi. 2. Menganalisis faktor sosiodemografi dan ekonomi yang terkait dengan kerawanan pangan dan gizi lansia di	1) Sebagian besar responden lansia tergolong tahan pangan (67 persen), dan sisanya mengalami kerawanan dengan proporsi masing-masing 10 persen rawan pangan ringan, 19 persen rawan pangan sedang,

		Sharpeville, Afrika Selatan	dan 4 persen mengalami rawanan pangan parah. 2). Analisis regresi menunjukkan bahwa usia dan status perkawinan merupakan prediktor kerawanan pangan dan gizi
4.	Wilna Oldewage-Theron et. Al (2018) *Food Insecurity and Food Access Among Seniors in Lubbock, Texas*	*To determine the prevalence of food insecurity among seniors (≥ 50 years) and to examine the relationships between food security and a variety of interpersonal, intrapersonal and environmental factors influencing food access among seniors in Lubbock*	*This finding is consistent with the fact that seniors have been identified as the first of seven vulnerable groups at risk of food insecurity in the US. More in-depth studies are needed to explore the various interpersonal, intrapersonal and environmental factors that contribute to food and nutrition insecurity of seniors to plan and implement suitable food and nutrition strategies*
5.	SRI LESTARI, Mulyadi Sumarto	menggambarkan bentuk-bentuk program pelayanan kesehatan bagi lansia, kendala	Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesehatan

	Studi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta	pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi lansia, serta peran puskesmas dalam upaya peningkatan kesehatan dan keaktifan lansia	dan keaktifan lansia di wilayah sekitarnya dengan melaksanakan program Puskesmas Santun Lansia, Program Posbindu, Program Prolanis, dan Program Posyandu Lansia. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia sebagai pelaksana program serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam program. Sedangkan peran dari Puskesmas Mantrijeron antara lain sebagai penyedia layanan kesehatan yang terpadu di mana upaya pelayanan yang diberikan mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, perwujudan pemberdayaan masyarakat, dan

			perwujudan Active Ageing pada pilar kesehatan.
6.	Syafira Mulia Sari Pane, Rudi Kristian P Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Rawan Pangan Di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan	Dinas Ketahanan Pemerintahan Kota Medan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pangan yang secara struktural menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. sesuai tupoksi, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan harus mampu memberdayakan seluruh komponen/perangkat daerah yang ada. Sehingga, dengan koordinasi diantara pelaku pembangunan, penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Medan dapat	Upaya ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam memvariasikan makanan, program ini juga menyebabkan ketergantungan sehingga masyarakat tidak memiliki usaha untuk meningkatkan gizi mereka, dan dan kurangnya pengawasan oleh Kota Medan sehingga ada masyarakat yang menyalahgunakan bantuan.

		terlaksana secara berhasil dan berdayaguna	

Berdasarkan penjabaran pada Tabel 1.1 diatas , dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang menganalisis terkait kebijakan sosial terhadap lansia khusunya terkait kerawanan pangannya. Penelitian ini pertama kali dilakukan di Sulawesi Selatan karena berkaitan dengan kondisi struktur penduduk di Sulawesi Selatan yang baru saja memasuk *aging population*. Penelitian terkait lansia idealnya dilakukan pada wilayah yang sudah memasuki struktur umur tua.

2.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan jalur suatu penelitian dan mendasarinya secara kuat pada konstruksi teoritis. Tujuan keseluruhan kerangka kerja ini adalah untuk membuat temuan penelitian lebih bermakna, dapat diterima oleh konstruksi teoritis di bidang penelitian dan memastikan generalisasi. Kerangka ini membantu merangsang penelitian sambil memastikan perluasan pengetahuan dengan memberikan arahan dan dorongan terhadap penemuan penelitian. Mereka juga meningkatkan empirisme dan ketelitian penelitian. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika mengatakan bahwa kerangka teoritis dan konseptual memberi kehidupan pada sebuah penelitian (Imenda, 2014). Temuan penelitian dapat menjadi lemah jika penerapan kerangka teori dan/atau kerangka konseptual tidak tepat. Hal ini dapat mengaburkan pemahaman pembaca penelitian akibat tidak mengetahui tujuan penelitian, manfaat penelitian, arah penelitian. Suatu penelitian tanpa kerangka teoritis atau konseptual menyulitkan pembaca dalam memastikan

posisi akademis dan faktor-faktor yang mendasari pernyataan dan/atau hipotesis peneliti. Hal ini menjadikan penelitian tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :

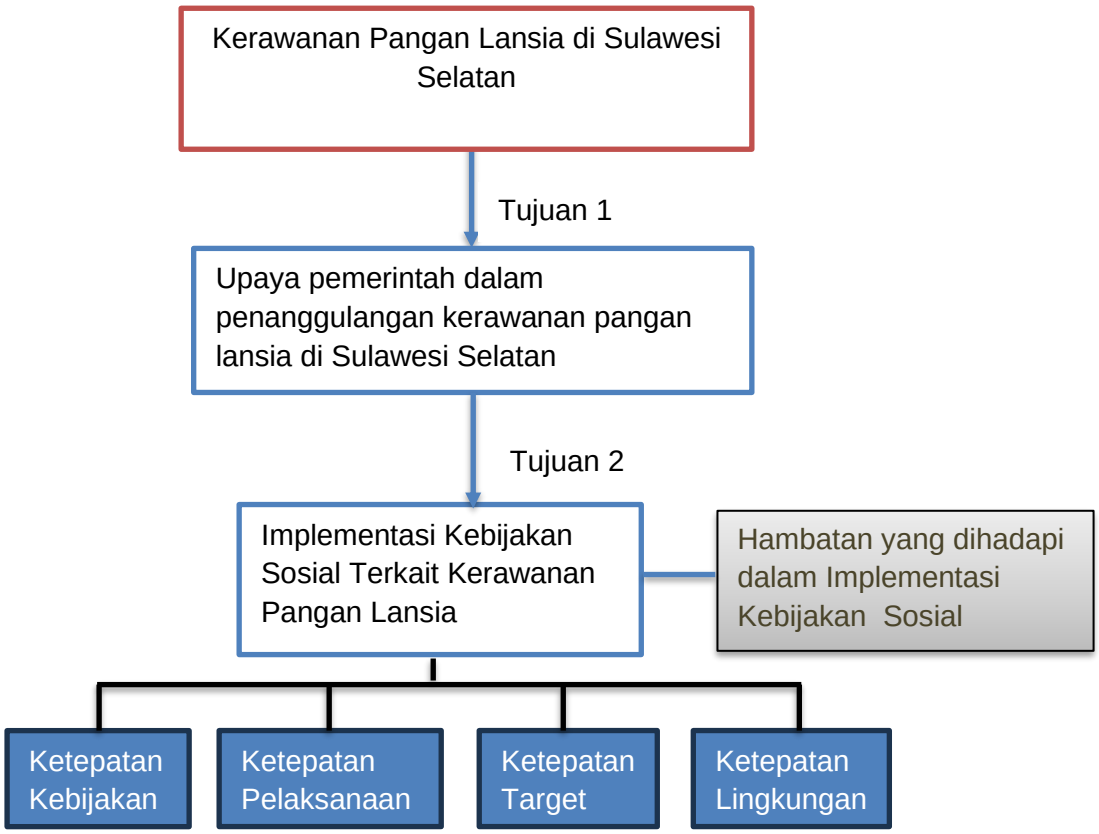

Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian

Hubungan yang kuat antara upaya pemerintah dalam penanggulangan kerawanan pangan lansia dan implementasi kebijakan pangan yang baik dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk mencapai ketahanan pangan lansia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Selain itu, keterlibatan aktif dan dukungan masyarakat juga penting untuk memastikan keberhasilan

implementasi kebijakan tersebut. Namun. Disinyalir implementasi kebijakan tidak dapat maksimal akibat adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.